

**TESIS**

**RELASI KUASA PUNGGAWA SAWI DALAM ARENA POLITIK  
(Studi pada Komunitas Pedagang Antara Pulau di Desa Turasu  
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)**

**POWER RELATIONS OF PUNGGAWA SAWI IN THE POLITICAL  
ARENA (Study on Inter-Island Merchants Community in Tarasu  
Village, Kajuara District, Bone Regency)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Ahmad Kamal  
E032171010**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**RELASI KUASA PUNGGAWA SAWI DALAM ARENA POLITIK**  
*(Studi pada Komunitas Pedagang Antara Pulau di Desa Turasu Kecamatan  
Kajuara Kabupaten Bone)*

**AHMAD KAMAL**  
**E032 17 1 010**  
**S O S I O L O G I**

**PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**RELASI KUASA PUNGGAWA SAWI DALAM ARENA POLITIK**  
*(Studi pada Komunitas Pedagang Antara Pulau di Desa Turasu Kecamatan  
Kajuara Kabupaten Bone)*

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi  
Sosiologi**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**AHMAD KAMAL**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**



## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### RELASI KUASA PUNGGAWA SAWI DALAM ARENA POLITIK (Studi Pada Komunitas Pedagang Antar Pulau Di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)

Disusun dan diajukan oleh

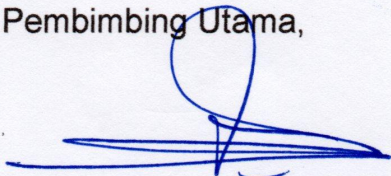
**AHMAD KAMAL**

E032171010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **13 September 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

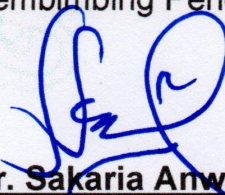
Menyetujui

Pembimbing Utama,



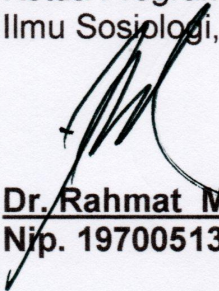
**Dr. Suparman Abdullah, M.Si.**  
Nip. 19680715199403104

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Sakaria Anwar, M.Si.**  
Nip. 196905292003121002

Ketua Program Studi  
Ilmu Sosiologi,



**Dr. Rahmat Muhammaad, M.Si.**  
Nip. 197005131997021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
Nip. 196511091991031008



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Kamal

Nomor Pokok : E032171010

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METAL TEMPEL'. The serial number 'CEAJX474284495' is visible at the bottom of the stamp.

Ahmad Kamal

## KATA PENGANTAR

Menyelesaikan sebuah tulisan ilmiah merupakan salah satu wujud tri darma perguruan tinggi yang beriringan dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dibagian tertentu, seringkali merepotkan penulis dengan variasi bahan dan sumber ide yang kian kompleks. Namun, penulis percaya bahwa setiap tulisan memiliki cara tersendiri dalam menyajikan hasil yang terbaik untuk pembaca. Dari sekian cara menyalurkan hasil tulisan dengan dukungan ide dan bahan yang bisa ditemukan, penulis maklumi bahwa setiap pembaca mempunyai cara sendiri dalam menginterpretasikan tulisan tersebut. Dalam asumsi penulis, hasil tulisan ini merupakan sebuah wadah untuk memperbincangkan banyak hal. Tulisan tersebut mempunyai kekhususan dalam membaca relasi kuasa punggawa sawi baik di darat maupun di laut di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Berdasarkan judul yang diformulasikan oleh penulis yaitu ***Relasi Kuasa Punggawa Sawi dalam Arena Politik (Kasus Pada Komunitas Pedagang Antar Pulau Di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)*** penulis berkeyakinan bahwa pembaca sudah bisa menerka jika tulisan ini membicarakan persoalan yang kian lumrah dan sering dijumpai di setiap forum diskusi dan kajian. Apa yang disajikan dalam tulisan ini mungkin belum proporsional dengan hasil dan temuan yang kian membumi di “dunia” ilmu pengetahuan. Tapi penulis

yakin bahwa hasil temuan ini dapat membangun pola dan cara tersendiri dalam memandang kehidupan masyarakat pulau dengan coraknya sendiri sebagai sumber ilmu pengetahuan yang harus terus digali

Berkat kerja keras serta ridho dan rahmat dari Allah SWT sehingga tesis ini terselesaikan. Kepada sejumlah pihak yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

- Kedua orang saya H. Bahktiar Beddu (Alm) dan Hj. Sitti Arfah yang selalu mendoakan dan merestui segala yang penulis lakukan, terutama dalam bidang pendidikan serta selalu bangga atas pencapaian kelima putranya dalam segala hal.
- Bapak Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sakaria Anwar, M.Si selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
- Bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si Bapak Drs. Hasbi, Ph.D serta bapak Dr. Mansyur Rajab, M.Si selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
- Kakak dan Adikku Babra Kamal, Ardian Kamal, Sabran Kamal dan Panca Sakti Kamal serta seluruh keluarga yang selalu memberikan bantuan secara materi dan non material dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

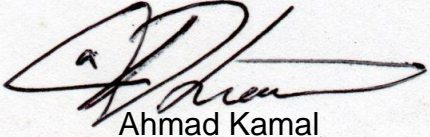
- Seluruh Keluarga saya di Pemerhati Seni Budaya Bone SANGDARA yang memberikan ruang kebagian kepada penulis ketika penulis mengalami kejenuhan selama proses penyelesaian studi, kepada adinda Ihsan Purnama dan Muh. Adzan Abrar yang telah membantu penulis dalam tahapan akhir perjuangan.
- Kakanda Rifal Najering yang berperan sehingga judul tesis penulis bisa terwujudkan serta tidak bosan-bosan membantu penulis selama menempuh studi.
- Saudara Anrical yang tidak terhitung bantuannya kepada penulis.
- Bapak Muhammad Tahir, S.Pd, MM kepala sekolah SMA Negeri 8 Bone yang selalu memberikan izin dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi.
- Seluruh informan dan semua orang yang telah membantu penulis ketika melakukan penelitian lapangan
- Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Pascasarjana Sosiologi FISIP Unhas.
- Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana sosiologi angkatan 2017 yang terus perhatian selalu kepada penulis sampai titik akhir.

Dalam hemat penulis, penulis menyadari hasil tulisan ini merupakan titik awal dalam melihat masalah-masalah yang lain. Seingganya penulis sadar bahwa, selalu terbuka pilihan dan kesempatan yang berbeda pula. Pada Hakekatnya penulis hanya bisa bersyukur



kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnyalah penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan baik, penulis selalu percaya atas kebesaran dan ridho dari-NYA.

Makassar, September 2021



Ahmad Kamal

## Abstrak

**AHMAD KAMAL.** Relasi Kuasa Punggawa Sawi Dalam Arena Politik (Studi Pada Komunitas Pedagang Antar Pulau Di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone). (dibimbing oleh **Suparman Abdullah** dan **Sakaria Anwar**)

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : untuk mengetahui relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di laut dan untuk mengetahui relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di darat.

Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan :1) Relasi kuasa antar punggawa sawi dalam arena politik di laut dalam hal modal kultural terjalin secara alami karna sistem yang dibangun pada awal perekrutannya adalah kekeluargaan dan modal ekonominya berjalan dengan baik karna dilihat dari kesukarelaan para punggawa yang mewujudkan kepeduliannya terhadap sawi-sawinya dengan memberikan bantuan ketika sawi atau keluarga sawi membutuhkan bantuan. Modal sosial Hubungan atau jejaring yang terkonstruksi antara punggawa laut dengan sawi yaitu hubungan kerja sama atas dasar kekerabatan. Modal simbolis punggawa diidentikan sebagai orang yang dermawan yang sering membantu ketika sawinya kesusahaan. 2) Relasi kuasa antar punggawa sawi dalam arena politik di darat dalam hal modal kultural penuh tekanan dari punggawa kepada sawi untuk mengikuti pilihan politik punggawa yang mengikuti kontestasi yang sedang berlangsung dan modal ekonominya ditentukan oleh modal ekonomi (uang) yang punggawa untuk mempengaruhi sawi dalam menentukan pilihan politiknya. Modal sosial hubungan kerja sama atas dasar tekanan punggawa terhadap sawi untuk mendukung pilihan politik punggawa darat. Dalam hal modal simbolis punggawa diidentikan sebagai orang yang dermawan yang sering membantu ketika keluarga sawinya kesusahaan dan juga simbol kekayaan dan harta yang banyak membuat punggawa darat dikenal oleh sawi dan keluarga sawi. 3) Perbedaan politik di laut lebih kepada penguatan pada kelompok sawi agar supaya bertahan dengan punggawa laut. Sedangkan pada politik darat mengedepankan kepentingan punggawa darat untuk mengarahkan kelompok sawi dan keluarganya dan menentukan pilihan politiknya sesuai dengan keinginan punggawa darat.

Kata kunci: Punggawa, Sawi, Relasi-Kuasa



## Abstract

**AHMAD KAMAL.**Power Relations of Punggawa Sawi in the Political Arena (Study on Inter-Island Merchants Community in Tarasu Village, Kajuara District, Bone Regency). (supervised by Suparman Abdullah and Sakaria Anwar

The objectives of this study are: to determine the power relations of the retainer mustard in the political arena at sea and to determine the power relation of the retainer mustard in the political arena on land.

The method used is a qualitative type with a case study method.

The results showed: 1) Power relations between mustard greens in the political arena at sea in terms of cultural capital existed naturally because the system built at the beginning of the recruitment was familial and the economic capital went well because it was seen from the volunteerism of the retainers who manifested their concern for mustard greens. the mustard greens by providing assistance when the mustard or mustard family needs help. Social capital The relationship or network that is constructed between the retainer of the sea and the mustard is a cooperative relationship on the basis of kinship. Symbolic capital The retainer is identified as a generous person who often helps when he is in trouble.2) Power relations between punggawa sawi in the political arena on land in terms of cultural capital are full of pressure from punggawa to mustard to follow the political choices of punggawa who follow the ongoing contestation and economic capital is determined by the economic capital (money) of the punggawa to influence mustard in determining political choice. The social capital of cooperative relations is based on the pressure of the retainer on the mustard greens to support the political choice of the land retainer. In terms of symbolic capital, the punggawa is identified as a generous person who often helps when the mustard family is in trouble and is also a symbol of wealth and wealth that makes land courtiers known by the mustard and mustard families. 3) Political differences at sea are more about strengthening the mustard group in order to survive with the sea courtiers. Whereas in land politics, the interests of land retainers are prioritized to direct the mustard group and their families and determine their political choices according to the wishes of the land retainers.

Keywords: Punggawa, Mustard, Power-Relation



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Punggawa Sawi .....	9
2.2 Relasi Kuasa Dalam Arena Politik .....	11
2.3 Teori Pertukaran Sosial dalam Perdagangan .....	21
2.4 Modal dalam Arena Politik .....	23
2.5 Relasi Kuasa Punggawa Sawi .....	26
2.6 Penelitian Terdahulu .....	28
2.7 Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian .....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36

3.3 Informan Penelitian .....	37
3.4 Sumber Data .....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data .....	42

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1 Lokasi Penelitian .....	44
4.1.2 Geografis dan Demografi .....	45
4.1.3 Keadaan Sosial .....	47
4.1.4 Keadaan Ekonomi .....	48
4.1.5 Gambaran Khusus Lokasi Penelitian .....	52
4.2 Profil Informan .....	53
4.3 Relasi Kuasa Punggawa sawi dalam Arena Politik di Laut .....	56
4.3.1. Modal Kultural.....	60
4.3.2. Modal Ekonomi .....	61
4.3.3. Modal Sosial .....	64
4.3.4. Modal Simbolik .....	67
4.4 Relasi Kuasa Punggawa Sawi dalam Arena Politik di Darat.....	69
4.4.1. Modal Kultural.....	70
4.4.2. Modal Ekonomi.....	73
4.4.3. Modal Sosial .....	78
4.4.4 Modal Simbolik .....	81

#### **BAB V KESIMPULAN dan SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia secara geografis berciri negara maritim, dengan garis pantai terpanjang kedua didunia terbentang kurang lebih sepanjang 17.000 km<sup>2</sup>, menjadi tempat hidup bagi komunitas pesisir, seperti pedagang, nelayan, pelaut, petambak dan komunitas lainnya yang hidup berdampingan satu sama lain.

Pelras (2006) dalam bukunya Manusia Bugis menjelaskan ciri kelas masyarakat Bugis-Makassar sebagai komunitas maritim, membaginya menjadi dua kelas yakni kelas punggawa dan kelas sawi. Punggawa biasanya diasosiasikan dengan pemilik modal atau pemilik kapal, sementara sawi diasosiasikan dengan anak buah kapal. Namun dalam pembagian kelas tersebut, kedua kelompok ini mempunyai pola hubungan yang sangat erat terutama hubungan kerja.

Hubungan kerja yang terbentuk dalam sistem punggawa sawi yang biasa disebut dengan pola hubungan *patron client*. Punggawa adalah seorang yang mampu menyediakan kapital (sosial dan ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu usaha (biasanya berorientasi pada skala usaha maritim); sedangkan sawi adalah sekelompok orang yang bekerja pada punggawa dengan memakai atribut hubungan norma sosial dan persepakatan kerja. Hubungan ini terus berdinamika di tengah tekanan legitimasi atau marginalisasi, namun,

masih banyak yang harus dipahami terutama menyangkut hal aturan sosial tempat masyarakatnya berpijak. Aturan sosial atau hubungan sosial yang dilandasinya lebih banyak tentang sistem hirarki sosial, kekerabatan keluarga dan perkawinan menjadi ciri khas sistem punggawa-sawi.

Keberadaan punggawa-sawi sebagai sistem tradisional yang ada pada masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dibentuk dalam konsep hubungan antara punggawa dan sawi yang dikenal sebagai hubungan relasi kuasa. Kekuasaan dipahami sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain (Foucault, 2002)

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mattulada bahwa hubungan patron-klien merupakan pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan secara khusus sebagai ikatan persahabatan. Artinya, seorang individu dengan status sosial ekonomi lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk menyediakan perlindungan serta keuntungan-keuntungan bagi seorang dengan status yang lebih rendah (*klien*). Kajian relasi *patron-client* dalam punggawa dan sawi yang melihat kelembagaan masyarakat nelayan sebagai mekanisme penjaminan sosial ekonomi tradisional atau *traditional socio-economic security* (Scott, 1993: 7-8).

Relasi antara punggawa dan sawi dapat dikategorikan sebagai hubungan yang tidak seimbang atau tidak adil dalam kondisi perolehan.

Hubungan kekerabatan ini lebih banyak terjadi dengan tetap menggunakan norma sosial adalah pada tingkat lokal seperti pedesaan. Hubungan antara superior dan sejumlah inferior didasari oleh pertukaran pelayanan (*service*) yang tidak seimbang. Malah dikatakan bahwa besarnya nilai pertukaran antara punggawa dan sawi lebih banyak disandarkan oleh besarnya perhatian atau pemberian yang terjadi. Misalnya, sawi akan memberikan penghormatan kesepakatan norma kepada Punggawa sesuai dengan besarnya *service* yang diberikan oleh punggawanya.

Relasi punggawa dan sawi dalam perspektif Bourdieu (Krisdinanto, 2014:191) memperlihatkan bahwa hubungan atau pemetaan kekuasaan antara punggawa dan sawi. Dimana dominasi yang di asumsikan selalu ada dalam relasi kuasa punggawa sawi. Model dominasi tidak hanya berdimensi ekonomi sebagaimana pendapat Marx, tetapi ada juga dominasi budaya, politik, gender, seni, dan sebagainya. Teorinya tentang dominasi simbolis (praktik kuasa dalam konteks simbolis) Bordieu menyodorkan konsep modal simbolik, modal kultural, mosal sosial, dan modal ekonomi.

Observasi awal yang peneliti lakukan di salah satu kelompok pedagang antar pulau di Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone menunjukkan bahwa ada pola hubungan antara punggawa dan sawi yang tidak seimbang, akan tetapi para sawi tetap bertahan karna

beberapa faktor termasuk faktor diantaranya yang paling terlihat adalah faktor kekerabatan (keluarga). Relasi itu biasanya terbentuk dari hubungan keluarga dekat seperti para sepupu, keponakan bahkan menantu dan keluarga lainnya. Mereka itu dapat terdiri atas para sepupu, keponakan, bahkan menantu dan keluarga lainnya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama sehingga pola hubungan yang tidak seimbang ini cenderung tidak terlihat diantaranya.

Faktor lain yang juga menjadi variabel sehingga para sawi tetap setia dengan punggawanya meski para punggawa tidak pernah adil terhadap sawi-sawinya yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktor ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para punggawa untuk membuat sawi merasa memiliki keterikatan dengan padanya, sehingga kesetiaan dan keutuhan kelompok sawi tetap terjaga, meskipun punggawa harus mengeluarkan anggaran tersendiri untuk sawi yang membutuhkan bantuan. Tanpa disadari, sawi pun tidak akan keberatan untuk setia dan patuh bahkan akan cenderung merasa senang sebab segala bentuk risiko ekonomi akan ditanggulangi oleh punggawa.

Namun demikian, terjadi hubungan *de facto* antara punggawa dan sawi akibat normanya bergeser dari pengikat hubungan sosial ke hubungan sosial, seperti mekanisme pembayaran. Pengikat hubungan norma ini lebih banyak ditentukan oleh fungsi atau peran punggawa sebagai figur utama untuk semua sawinya, termasuk pinjaman keuangan

dan perlindungan atau kesediaan menyediakan bantuan pada saat dibutuhkan.

Keadaan ini sepertinya disadari para punggawa untuk melakukan penetrasi kepentingan kepada sawinya, yang secara tidak langsung mengabdikan dirinya demi kepentingan punggawanya sebab pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh punggawa terhadap para sawi dan keluarganya yang ditinggalkan pada saat aktivitas melaut sedang dilakukan oleh sawi. Namun, konteks berbeda terjadi di Desa Tarasu. Di desa ini, para punggawa selain menguasai menegemen ekonomi, ternyata juga mampu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat politis dalam kesehariannya.

Tindakan yang bersifat politik yang di maksud disini adalah bagaimana para punggawa memanfaatkan para sawinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti ekonomi dan termasuk kebutuhan politiknya misalnya saja pada saat melaut para punggawa tidak segan memberikan tambahan pembagian selain yang sudah di tentukan sebelum melakukan perjalanan sehingga pemberian itu memberikan pengaruh besar terhadap perilaku sawi yang semakin patuh terhadap punggawanya.

Kondisi ini terlihat pada salah satu komunitas pedagang di Dusun Tuju-tuju Desa Tarasu. Salah satu punggawa bernama Heril menuturkan bahwa pemberian tambahan upah bagi sawi itu sudah menjadi rutinitas setiap waktu pembagian upah terhadap para sawinya yang dianggap



sebagai bonus. Pemberian upah tambahan ini uniknya juga biasa dilakukan oleh bukan hanya di waktu hasil dagangannya mempunyai keuntungan besar, namun juga saat keuntungan berada dalam keadaan normal seperti keadaan pada umumnya. Bonus yang diberikan ini ternyata bagai dari pada cara punggawa untuk mengikat sawinya agar sawinya menganggap bahwa kebutuhan dan kesejahteraan mereka cukup diperhatikan oleh punggawa. Dengan perlahan, para sawi berupaya melakukan balas budi berupa kesetiaan dan berpikir untuk tidak mencari punggawa lain.

Cara tersebut dilakukan para punggawa sebagai bagian dari upaya membangun relasi dan dominasi guna memertahkan kuasanya atas para sawi. Bentuk bantuan maupun perlindungan dilakukan untuk menjaga kesetiaan para sawi dan terus menggantungkan kehidupannya pada kekuatan modal yang dimiliki oleh punggawa. Dengan demikian, segala pemberian itu memiliki maksud lain yang secara tersirat berpengaruh pada pola relasi diantara keduanya. Keadaan ini yang disebut sebagai politik laut oleh para punggawa.

Sedangkan fenomena politik di darat yang peneliti jumpai pada saat observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa terdapat punggawa yang memanfaatkan relasi kerja (ekonomi) dengan sawi, untuk turut serta dalam jaringan politiknya. Salah satu punggawa besar bernama Takdir menggunakan basis kekuatan kerja untuk mendapatkan dukungan politis

dalam kontestasi politik yang disedang digelutinya maupun pihak keluarganya, seperti pemilihan kepala desa maupun pemilihan legislatif. Relasi ekonomi atau kerja yang terjalin antara punggawa-sawi dimanfaatkan untuk membangun kekuatan atau dukungan sosial sehingga jaringan keluarga maupun kerebat dari para sawi secara tidak langsung akan termobilisasi akibat hubungan kerja yang sebelumnya telah terjalin.

Gambaran di atas memperlihatkan dua pola relasi kuasa yaitu relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di laut dan arena politik di darat. relasi punggawa sawi dalam arena politik di laut lebih mengarah kepada pada penguatan kelompok sawi dan relasi punggawa darat lebih mengarah pola relasi yang terjalin antara punggawa dan sawi pada wilayah kepentingan politik. Para punggawa memanfaatkan hubungan basis kerja dengan para sawi, untuk ikut andil dan dalam mengerahkan para kelompok sawinya dan segala komunitas sosialnya agar mengikuti pilihan dan arahan politik sang punggawa.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di laut?
2. Bagaimana relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di darat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di laut.
2. Untuk menganalisis relasi kuasa punggawa sawi dalam arena politik di darat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Institusi Pendidikan: diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan menambah referensi keilmuan seputar wacana kehidupan sosial, khususnya tentang pola interaksi dalam komunitas nelayan di Indonesia.
2. Peneliti lainnya : diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan mengembangkannya dalam penelitian yang berkelanjutan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Punggawa Sawi

Dalam struktur ekonomi masyarakat nelayan dikenal adanya Punggawa dan Sawi yang dimana yang hubungan sosialnya yang menonjol dalam kehidupan masyarakat tergantung pada pada penangkapan ikan dilaut. Menurut Paeni (1990:76) mengatakan bahwa:

*Istilah Punggawa dan nelayan Sawi berasal dari bahasa Bugis, yakni Punggawa berarti pemimpin atau pemilik modal, sedangkan Sawi adalah pengikut atau rakyat yang tidak mempunyai capital. Masyarakat nelayan pada umumnya untuk membedakan sistem pelapisan sosialnya dapat dilihat dari kepemilikan modal dan alat-alat produksi dalam usaha penangkapan ikan.*

Lebih lanjut Paeni (1990:76) mengatakan bahwa:

*Seorang akan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat jika memiliki modal kapital yang besar. Semakin banyak modal kapital yang dimiliki, maka semakin banyak sawi atau pengikut yang bisa dipimpinya yang secara otomatis pula akan memiliki kedudukan yang penting dimata masyarakat nelayan.*

Dari pengertian di atas hubungan antara Punggawa dan Sawi memiliki hubungan sosial yang sangat akrab dan penting, sehingga sawi sulit melepaskan diri dari punggawanya. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi (2011:2) mengatakan:

*Bagi seorang sawi, tanggungan biaya hidup dan keperluan-keperluan merupakan bantuan yang tidak semata berdimensi ekonomis. Bantuan demikian, meskipun dalam bentuk hutang merupakan mekanisme mempertahankan kehidupan di atas level survive dari pola subsistens. Setiap kali sawi dan keluarganya membutuhkan suatu secara mendadak, punggawa selalu tampil sebagai penolong yang menyelamatkan. Nilai yang harus dibayar oleh sawi bukan hanya material dari bantuan tadi, tetapi juga imbalan hutang budi yang menyertainya.*

Dalam penjelasan di atas seorang punggawa cenderung mempertahankan kelanggengan hubungan, di pihak punggawa semakin lama seorang sawi bekerja padanya berarti tercipta saling ketergantungan baik dalam penangkapan ikan di laut maupun kegiatan-kegiatan yang berdimensi sosial.

Secara historis, punggawa dapat diartikan sebagai pemimpin bagi suatu etnis tertentu. Karena sifatnya lokalitas, maka kekuatan hubungan sosialnya juga ikut terpengaruh, seperti tingginya tingkat kepercayaan dan gantungan harapan oleh pengikutnya (Sawi) kepada Punggawanya. Hubungan ini juga timbul sedikit banyak dipengaruhi akibat perang fisik yang terjadi di masa lalu, saat itu kelompok etnis tertentu mencari seorang yang dapat dijadikan majikan pemimpin di dalam hal penyediaan perlindungan. Persepsi perlindungan ini terus berlanjut dari hal perlindungan fisik menjadi perlindungan akan perolehan sumber hidup berasal dari sumberdaya sekitarnya. Akibatnya terbentuk suatu kepatuhan norma dan hubungan mengikat yang secara sosial terbentuk untuk kelangsungan hidup mereka. Sedangkan pengikut yang dinormakan sebagai kepatuhan untuk memenuhi petunjuk atau perintah yang diberikan punggawa (Raodah: 2014).

Menurut walino (Raodah: 2014) mengatakan bahwa punggawa adalah seorang yang mampu menyediakan capital ( sosial dan ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu usaha (biasanya



berorientasi pada skala usaha penangkapan ikan); sedangkan sawi adalah sekelompok orang yang bekerja pada punggawa dengan memakai atribut hubungan norma sosial dan persepakatan kerja.

Hubungan ini terus berdinamika ditengah tekanan legitimasi atau marginalisasi, namun, masih banyak yang harus dipahami terutama menyangkut hal aturan sosial tempat masyarakatnya berpijak. Aturan sosial atau hubungan sosial yang dilandasinya lebih banyak tentang sistem hirarki sosial, kekerabatan keluarga dan perkawinan menjadi cirri khas sistem punggawa sawi. Pada banyak hubungan sosial ini lebih banyak dilandasi oleh adanya penghormatan akan konsep siri' (malu), senasib sepenanggungan (dalam bahasa Makassar disebut pace) dengan orientasi kepada pengesahan perilaku sosial yang melingkupi sistem tradisional ini tidak semuanya dibenarkan.

## **2.2 Relasi Kuasa Dalam Arena Politik**

Kekuasaan tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu Negara atau institusi hukum yang mengandaikan

dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok (Foucault: 2002)

Foucault (1980) tentang kekuasaan (*power/duvoir*) tidak terlepas dari relasinya dengan pengetahuan (*knowledge/savoir*). Ia melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, di mana dia melihat pengetahuan adalah kekuasaan. Bagaimana relasi itu sebenarnya? Dalam *The Archaeology of Knowledge*, ia menjelaskan konsep *discourse* (diskursus) sebagai gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan. Diskursus merupakan gagasan penting dalam pemikiran Foucault, dijelaskan sebagai penjelasan, pendefinisian, pengklasifikasian dan pemikiran tentang orang, pengetahuan dan sistem abstrak pemikiran. Diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan berkaitan dengan pengetahuan. Oleh sebab itu, ia berpandangan bahwa kekuasaan tersebar dan datang dari mana-mana.

Istilah 'relasi kuasa' (*power relation*) adalah sebuah istilah penting dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dan terutama belakangan ini dalam Kajian Budaya. Foucault menegaskan bahwa power atau kuasa bersifat ubiquitous atau ada dimanamana, dan semua kuasa mencakup perjuangan untuk memediasi, menciptakan makna, dan melakukan control (Lewis, 2008: 31).

Selanjutnya Lewis (2008: 32) mengatakan bahwa proses hadirnya kuasa sudah tampak dalam penggunaan bahasa dan tindakan-tindakan

fisik yang mungkin menyertainya. Para ahli teori budaya dan kaum analis pada umumnya sepakat bahwa ada hubungan erat antara proses mediasi kuasa dan penggunaan bahasa. Kekuasaan menurut Foucault (2002) lebih menunjuk pada mekanisme dan strategi dalam mengatur hidup bersama. Dalam arti ini kekuasaan mengasalkan diri dari berbagai sumber dan memiliki keterkaitan satu terhadap yang lain.

Adanya pengakuan struktur-struktur yang menjalankan fungsi tertentu dan dalam struktur itulah kekuasaan mengasalkan dirinya, Selanjutnya menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami sebagai :

*power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony." (Foucault, 1980: 92-93).*

Dengan demikian, kekuasaan menurut Foucault (1980) mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. Mengacu pada pandangan Foucault bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, disana ada kekuasaan (Foucault, 2000 : 144),

Selanjutnya Foucault (2000: 94-95) menjelaskan ada 4 proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi *distingsi binary opositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.

4. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*).

Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang beradadalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Foucault bahwa kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang diwariskan, diperoleh dari seseorang atau sebuah kelompok masyarakat sebagai sebuah hadiah yang kemudian dapat digunakan atau dibagi-bagi. Kekuasaan dapat ditemukan dimana saja karena kekuasaan akan terus beroperasi dimana relasi-relasi itu berada. Relasi kuasa yang dimaksud Foucault bukanlah relasi kekuasaan yang mengumpamakan adanya sebuah hirarki kekuasaan yang kemudian membentuk kelas sosial dengan adanya kelompok yang di kuasai dan kelompok yang menguasai atau *distingsi binary oppositions* dengan melakukanklasifikasi yang berhubungan secara struktural.

Selanjutnya beberapa metedologis kekuasaan yang menjadi fokus perhatian Foucault (2000) adalah sebagai berikut :

1. Peran hukum dan aturan-aturan. Foucault mengatakan “kuasa tidak selalubekerja melalui represif dan intimidasi melainkan pertama-tapa bekerjamelalui aturan-aturan dan normalisasi”. Segala aturan dan hukum pertamatidak dilihat sebagai hasil dari ketentuan pemimpin atau institusi tertentutetapi sebagai sintesis dari kekuasaan setiap orang yang lahir karenaperjanjian. Segala aturan yang lahir karena konsensus bersama memilikikekuatan yang lebih dalam hidup bersama.



2. Tujuan kekuasaan. Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan ialah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang produktif. Setiap orang diberi ruang untuk berpikir, berkembang dan dengan bebas menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bersama.
3. Kekuasaan itu tidak dilokalisasi tetapi terdapat di mana-mana. Kesadaran akan kekuatan dari suatu negara dan masyarakat tidak dibatasi hanya dari para pemimpin tetapi atas kerjasama setiap pribadi dan lembaga yang memiliki orientasi produktif. Misalnya, dengan adanya ruang komunikasi antara pemimpin dan warganya, kesatuan tercipta dalam suasana dialogis dan mengarah kepada cita-cita bersama.
4. Kekuasaan yang mengarah ke atas. Dalam arti ini, kekuasaan setiap orang dan lembaga dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga membentuk konsensus bersama. Atau dengan kata lain hasil dari proses komunikasi kekuasaan bersama akan menghasilkan kekuasaan bersama atau dalam bahasa, Thomas Kuhn, adanya paradigma bersama.
5. Kombinasi antara kekuasaan dan Ideologi. Setiap anggota dalam masyarakat kurang lebih memiliki impian yang sama yaitu adanya pengakuan hal setiap orang yang terarah pada kesejahteraan bersama.

Harapan ini harus berjalan bersama dengan kekuasaan bersama. Segala hukum dan aturan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari kelima point di atas, kita melihat dengan jelas adanya perbedaan menyolok antara gagasan Foucault dengan para pemikir abad modern. Misalnya, Machiavelli yang melihat kesejahteraan bersama tidak ditentukan oleh *consensus* bersama tetapi oleh penguasa Negara, bahwa penguasa memiliki kuasa mutlak untuk mengatur negara. Tidak ada aturan dan hukum yang muncul sebagai akibat perjanjian setiap subyek. Dengan membandingkan kedua gagasan ini, kita dapat melihat bahwa arti kekuasaan dan jiwa yang menggerakkan hidup bersama memiliki titik tolak yang berbeda. Foucault menjunjung tinggi pada proses kreatif dan kritis setiap orang dalam membangun ideologi bersama (Santoso, 2002: 59)

Kekuasaan itu tidak dipandang secara negatif tetapi secara positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan sebuah institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki tetapi kekuasaan merupakan istilah untuk menyebut situasi strategis, kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan itu menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis (Kamahi, 2017: 118).

Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Foucault menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi

pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi (Sutrisno,2017: 175)

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (Thomas, 2004: 10).

Stewart (Agusta, 2008: 266-267) membagi kekuasaan dalam dua bagian, yaitu: Pertama, kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (*power over*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas sehingga memiliki keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada orang lain; Kedua, kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (*power to*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses inter-subyektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.

McQuail (Burton, 2012 : 58) menjelaskan bahwa lokasi kekuasaan tidaklah disatu tempat tetapi menyebar dan bervariasi dalam institusi, masyarakat, individu, dan audiens. secara umum dapat di jelaskan bahwa kuasa atau kekuasaan itu tidak terpusat, tidak bergerak dari satu arah ke arah lain, akan tetapi bisa muncul dan bergerak dari berbagai arah. kuasa yang biasa diasosiasikan secara tradisional dengan politik, pemerintahan, dan pemimpin, sebetulnya merupakan hal yang tersebar di berbagai tempat, bersifat cair, dan berkaitan dengan proses atau usahausaha menciptakan makna, pertengkar, sengketa dan pencarian jalan ke luar (*dispute and dissolution*).

Lebih lanjut (Dahl 1957: 201) mendefinisikan kekuasaan (power) merupakan relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam symbol sederhana. Kekuasaan dapat bersifat konfliktual (conflictual) dan koersif (coercive), sehingga perlu dibangun melalui konsensus (consensus) dan legitimasi (legitimacy) Kekuasaan bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dikultivasi (cultivated). Kekuasaan tidak akan kehilangan kekuatannya, bila ia digunakan dengan memanfaatkan berbagai taktik untuk mempengaruhi berbagai agenda. Selanjutnya, Kekuasaan merupakan wujud adanya kewenangan yang *legitimate*.

Kuasa atau kekuasaan didefinisikan oleh Dijk (Eriyanto, 2005: 272) sebagai 'kepemilikan yang dimiliki' oleh suatu kelompok atau anggotanya

untuk mengontrol anggota kelompok dari anggota kelompok lain. Seperti halnya yang disampaikan oleh Foucault dan Gramsci, kontrol bisa dilakukan secara langsung lewat kekuatan fisik, tetapi juga bisa secara tidak langsung atau cara-cara persuasif. Kepemilikan akan kekuasaan ditentukan oleh berbagai hal seperti sumber-sumber daya, uang, status, dan pengetahuan. Kontrol bisa dilakukan secara tidak langsung dengan memengaruhi melalui penyebaran pengetahuan. Siapa memiliki modal-modal seperti di atas lebih banyak identik dengan memiliki kekuasaan lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Martin (1995: 98), juga menambahkan bahwa penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat di katakan bahwa Relasi kuasa merupakan kondisi yang sangat kompleks ditentukan oleh berbagai kepemilikan modal dan situasi sosial politik. Dalam masyarakat sederhana atau kompleks, di desa atau di kota, daerah maritim atau daerah pertanian, relasi kuasa pasti terjadi dengan hasil dan kondisi yang berbeda-beda bergantung pada kepemilikan modal oleh tiap-tiap pilar

yang terlibat. kekuasaan akan terus beroperasi dalam sebuah relasi yang ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi.

### **2.3 Teori Pertukaran Sosial dalam Perdagangan**

Salah satu teori yang digunakan dalam menjelaskan penelitian ini yaitu teori Peter Blau tentang Pertukaran Sosial. Menurutnya pertukaran sosial dapat diamati dalam kehidupan keseharian kita baik dalam masyarakat yang paling sederhana. Pertukaran sosial menurut Peter Blau terjadi dalam bentuk *gift* dan *services*. *Gift* yang diterima tidaklah secara sukarela, namun diberikan dibawah obligation. Lebih jauh lagi, suatu yang dipertukarkan tidak hanya dalam bentuk goods and wealth, real and personal property dan economi values, namun juga kesopanan, hiburan dan lain-lain (Blau dalam Ritzer, 2013).

Dalam teori pertukaran sosial menekankan adanya suatu konsekuensi dalam pertukaran baik yang berupa ganjaran materill, missal yang berupa barang maupun spiritual yang berupa pujian. Selanjutnya untuk terjadinya pertukaran sosial harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah (1) suatu perilaku atau tindakan harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat tercapai lewat interaksi dengan orang lain; (2) suatu perilaku atau tindakan harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan yang dimaksud.

Adapun tujuan yang dimaksud dapat berupa ganjaran atau penghargaan intrinsic yakni berupa pujian, kasih saying, kehormatan dan

lain-lainnya atau penghargaan ekstrinsik yaitu berupa berupa benda-benda tertentu, uang dan jasa. Harapan-harapan yang akan diperoleh dalam pertukaran sosial menurut Blau (Dalam Ritzer, 2013) yaitu (a) ganjaran atau penghargaan (b) lahirnya deferensiasi kekuasaan (c) kekuasaan dalam kelompok; dan (d) keabsahan kekuasaan dalam kelompok. Blau berpendapat bahwa (1) individu-individu dalam kelompok-kelompok yang sederhana (mikro) satu sama lain dalam pertukaran sosial mempunyai keinginan untuk memperoleh ganjaran ataupun penghargaan; dan (2) tidak semua transaksi sosial bersifat simetris yang didasarkan pada pada pertukarn sosial yang seimbang.

Menurut Arifin (2012: 247) selain model pertukaran dalam bentuk barang dan jasa juga yang berlangsung dalam relasi punggwa sawi, juga ada pertukaran lain yang dia sebut sebagai "Pertukan nilai kepatuhan. Sistem pertukaran nilai kepatuhan atau nilai ketaatan yang berlangsung dalam relasi sosial budaya punggawa dan sawi, umumnya didasarkan atas kesepakatan yang tidak tertulis. Nilai kepatuhan atau nilai ketaatan diantara mereka lebih bersifat kontraktual (kontrak sosial) yang tumbuh secara organic atau terbangun dengan sendirinya melalui proses "usages"(cara-cara) , folkways (kebiasaan), "mores" (tata kelakuan), dan costum (adat-istiadat) dalam kelompok-kelompok social nelayan. Karena itu, pertukaran nilai kepatuhan menjelma dalam relasi punggawa dan sawi

melalui frekuensi perulangan tindakan social-budaya dalam interaksinya sehari-hari, dalam rentang waktu yang sangat panjang.

#### **2.4 Modal dalam Arena Politik**

Dalam tradisi Marxian, bentuk-bentuk modal didefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi. Konsepsi Marxian tentang modal dianggap terlalu menyempitkan pandangan atas gerak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun Bourdieu tetap menganggap penting modal ekonomi, yang diantaranya alat-alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan, benda-benda), dan uang. Modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relative paling independen dan dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain.

Namun selain modal ekonomi, Bourdieu juga menyebut modal simbolik, modal kultural, dan modal sosial. Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). (Bourdieu: 1993) Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik



bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya (Haryatmoko: 2014)

Modal sosial termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal sosial atau jaringan sosial ini dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa (Bourdieu: 1993; Haryatmoko: 2014)

Seperti halnya modal ekonomi, jenis-jenis lain modal tersebar tidak merata di antara kelas-kelas sosial dan fraksi-fraksi kelas. Meskipun jenis jenis modal itu samasama bisa diubah dalam kondisi tertentu (contohnya, jenis dan jumlah modal kultural yang tepat bisa diubah menjadi modal ekonomi melalui penempatan yang menguntungkan di pasar tenaga kerja), mereka tidak bisa direduksi satu sama lain. Kepemilikan modal ekonomi tidak serta-merta mengimplikasikan kepemilikan modal kultural atau simbolis.

Lebih lanjut Bourdieu (Yusuf, 2016:119) mengajukan hipotesis bahwa “pada semua masyarakat ada hal/ kelompok yang mendominasi dan didominasi dan perbedaan itu pada dasarnya adalah prinsip dasar

organisasi sosial. Dominasi itu sendiri sangat tergantung pada situasi, sumber daya serta strategi para pelaku aktornya. Untuk memahami fenomena tersebut harus mengenali berbagai logika efek (pengaruh) antara posisi dan sumbernya. Melihat masyarakat sebagai “ruang” perbedaan-perbedaan, secara langsung merupakan pandangan alternatif bagi pandangan sebelumnya yang melihat masyarakat sebagai piramida atau masyarakat anak tangga yang memiliki hierarki.

Menurut Bourdieu (Yusuf, 2016) Ruang sosial terorganisasi berdasarkan dimensi:

1. Volume global sumber daya yang dimiliki.
2. Pembagian modal ekonomi (kekayaan, gaji, penghasilan) dan modal cultural (pengetahuan, ijazah, dan sikap dan pergaulan yang baik).  
Terbelahnya antara uang dengan kebudayaan, antara hal-hal yang “komersial” dengan hal yang “murni” menciptakan diskriminasi.

Dalam buku Lash (2004:248) Bourdieu menjelaskan tentang medan politik yang dimana medan politik dibahasakan sebagai medan yang paling kurang otonom. Menurutnya sebagian besar nilai produk politik itu lebih ditentukan di luar medan politik. Menurutnya nilai dari produk politis bergantung pada dua faktor:

1. Modal simbolik pelaku politik dan partainya (modal politis-simbolik termaksud kedudukan jabatan pengurus partai dan kedudukan di

jabatan nasional/ lokal dan tidak terlalu tinggi; maksimalisasi mengandaikan adanya sikap kompromis terhadap norma-norma sosial.

2. Sampai sejauh mana simbol-simbol politis ini (Bourdieu menyamakan dengan “penanda”) sesuai dengan minat dan makna pokok (“yang di tandakan”) dari para konsumen yang terstratifikasi secara sosial.

Dari penjelasan di atas produk politis merupakan produk simbolis atau dari satu sisi merupakan “penanda” dan termaksud “kedudukan, program, analisis, komentar dan peristiwa yang dihasilkan oleh para professional dalam bidangnya.

### **2.5 Relasi Kuasa Punggawa-Sawi**

Masyarakat pesisir memanfaatkan sumberdaya alam dengan mengorganisasikan diri mereka kedalam kelompok-kelompok sosial ekonomi yang dikenal dengan ikatan Punggawa-Sawi. Menurut Paeni dkk (1990:76) istilah punggawa dan nelayan sawi berasal dari bahasa Bugis, yakni Punggawa berarti pemimpin atau pemilik modal, sedangkan Sawi adalah pengikut atau rakyat yang tidak mempunyai kapital.

Masyarakat nelayan pada umumnya untuk membedakan sistem pelapisan sosialnya dapat dilihat dari kepemilikan modal dan alat-alat produksi dalam usaha penangkapan ikan. Seseorang akan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat jika memiliki modal kapital yang besar. Semakin banyak modal kapital yang dimiliki, maka semakin banyak Sawi atau pengikut yang bisa dipimpinya yang secara otomatis pula akan

memiliki kedudukan yang penting dimata masyarakat nelayan. Hubungan sosial yang menonjol dalam kehidupan masyarakat nelayan yang sumber kehidupannya tergantung pada penangkapan ikan dilaut adalah hubungan kerja antara pemilik modal dengan pekerjanya atau buruh yang dikenal dengan sebutan punggawa dan sawi (Rudi, 2011: 103).

Hubungan ini merupakan hubungan antara majikan dengan buruhnya dan hubungan ini bersifat sangat akrab dan penting, sehingga sawi sulit melepaskan diri dari punggawanya. Bagi seorang sawi, tanggungan biaya hidup dan keperluan-keperluan merupakan bantuan yang tidak semata berdemensi ekonomis. Bantuan demikian, meskipun dalam bentuk hutang merupakan mekanisme mempertahankan kehidupan di atas level *survive* dari pola subsistem. Setiap kali sawi dan keluarganya membutuhkan sesuatu secara mendadak, punggawa selalu tampil sebagai penolong yang menyelamatkan. Nilai yang harus dibayar oleh sawi bukan hanya material dari bantuan tadi, tetapi juga imbalan hutang budi yang menyertainya. Biasanya seorang punggawa cenderung mempertahankan kelanggengan hubungan, di pihak punggawa semakin lama seorang sawi bekerja padanya berarti tercipta saling pengertian, pengalaman sawi atas karakteristik ketekunan dan kejujurannya makin terpuji, dan ini bermuara pada orientasi aktivitasnya dalam penangkapan ikan di laut (Rudi, 2011: 103).

Pada dimensi sosialnya sawi yang setia, rela berkorban untuk kehormatan punggawanya akan memberikan nilai sosial tersendiri bagi punggawa di mata masyarakat. Pada hubungan ini pemilik modal atau punggawa dan nelayan yang tidak memiliki modal atau sawi telah terjadi suatu proses eksploitasi dalam pertukaran sosial, di mana kedudukan sawi sangat berpotensi untuk dieksploitasi. Seorang sawi sama sekali tidak punya alternatif bila hubungan terputus, bukan hanya dalam konsekuensi jangka panjang atas alternatif pekerjaan lain, tetapi konsekuensi jangka pendek pun menjadi ancaman, yakni terancamnya kehidupan subsistensi yang suatu saat sawi harus kembali bekerja pada punggawa (Rudi, 2011: 106).

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

1. Ansar arifin (2012) tentang Nelayan dalam Perangkap Kemiskinan (Studi Strukturasi Patron-klein dan Perangkap Kemiskinan pada Komunitas Nelayan di Desa Tamalate, Kec. Galeson, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil temuan penelitian ini adalah: (1) Prasyarat fungsional AGIL telah membuka ruang kapasitas bagi munculnya elemen-elemen baru yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem sosial kenelayanan sebagai tempat berlangsungnya strukturasi patron-klein, (2) meskipun AGIL telah membuka ruang kapasitas dalam sistem sosial kenelayanan, namun tidak dapat mengintegrasikan elemen-elemen baru ke dalam struktur relasi patron-klein, (3) dengan

adanya kekuatan strkturasi yang telah mengarahkan, membentuk, dan membatasi tindakan actor dalam relasi patron-klein, maka tidak memungkinkan bagi aktor sawi untuk dapat memanfaatkan elemen-elemen baru pada ruang kapasitas yang disajikan oleh AGIL, sehingga “perangkap kemiskinan” dalam relasi patron-klein tetap berlangsung.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai punggawa sawi sebagai locus penelitian. Dan letak perbedaan mendasar yaitu dalam penggunaan teori yang digunakan. Ansar Arifin menggunakan Teori AGIL sebagai pisau analisis sedangkan penelitian ini menggunakan teori Piere Bordieu yang menggunakan empat modal (modal Ekonomi, modal cultural, modal sosial dan modal simbolik). Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitiannya yaitu Ansar Arifin lebih kepada melihat patron-klein yang terjadi pada kelompok nelayan sedangkan penelitian ini lebih melihat patron-klein punggawa sawi komunitas perdagangan antar pulau.

2. Imam Mujahidin Fahmid (2012) tentang Identitas dalam kekuasaan Hibriditas Kuasa, Uang, dan Makna dalam Pembentukan Elite Bugis & Makassar yang meruapan rekonstruksi hasil penelitian, antara lain menemukan bahwa Etnis Bugis Bone memaknai kekuasaan sebagai alat untuk melipatgandakan kesejahteraan dan prestise kehidupan.

Persamaan dari penelitian ini yaitu memaknai bahwa kekuasaan sebagai alat prestasi kehidupan. Sedangkan perbedaannya Imam

Mujahidin Fahmid lebih melihat pada kelompok yang luas yang ada di Bone sedangkan penelitian ini lebih memperhatikan kelompok yang kecil yang ada di kabupaten bone khususnya pada kelompok pedagang antar pulau.

3. Legiyo. 2017. Relasi Punggawa dan Sawi pada bagan perahu (Studi kasus Nelayan di pulau Balang Lompo kabupaten Pangkep). Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi punggawa sawi yang terjadi pada punggawa sawi bagan perahu yaitu sistem bagi hasil yang kurang adil antara punggawa dan sawi karena didasarkan pada norma setempat, nilai lebih harga barang perbekalan melaut yang harganya lebih mahal dari harga pasar, disamping itu juga karena jeratang hutang yang dialami oleh sawi pada punggawa. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi punggawa pada sawi dapat diidentifikasi karena ketergantungan sawi pada punggawa, lapangan pekerjaan yang sempit, pendidikan yang rendah, dan ekonomi yang lemah. Untuk mengatasi eksploitasi yang terjadi usaha yang bisa dilakukan antara lain: dengan pendekatan budaya perlu adanya perubahan sistem bagi hasil yang ada, sistem ikatan kerja yang modern, peningkatan pendidikan nelayan, meningkatkan kesejahteraan dengan bantuan dan pemberdayaan masyarakat, serta perlu regulasi yang dilakukan pemerintah.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai relasi punggawa sawi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Legiyo lebih kepada eksploitasi sistem bagi yang kurang adil antara punggawa dan sawi sedangkan penelitian ini lebih kepada perbandingan relasi kuasa pada arena laut dan darat.

## **2.7 Kerangka Pikir**

Berdasarkan argumentasi di atas, peneliti ingin menjelaskan lebih dalam tentang relasi kuasa secara politik, baik di darat maupun di laut, yang terjalin antar punggawa dan sawi di laut.

Dalam perspektif Bordieu (Krisidianto, 2014: 203) bahwa relasi punggawa dan sawi dipengaruhi oleh empat modal yakni modal budaya, modal ekonomi, modal Sosial dan modal simbolik. *Modal kultural* adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana) dalam penelitian yang dijadikan modal kultural yaitu sistem kekerabatan. *Modal ekonomi* adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk modal lainnya. Modal ekonomi ini mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang.



Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial.

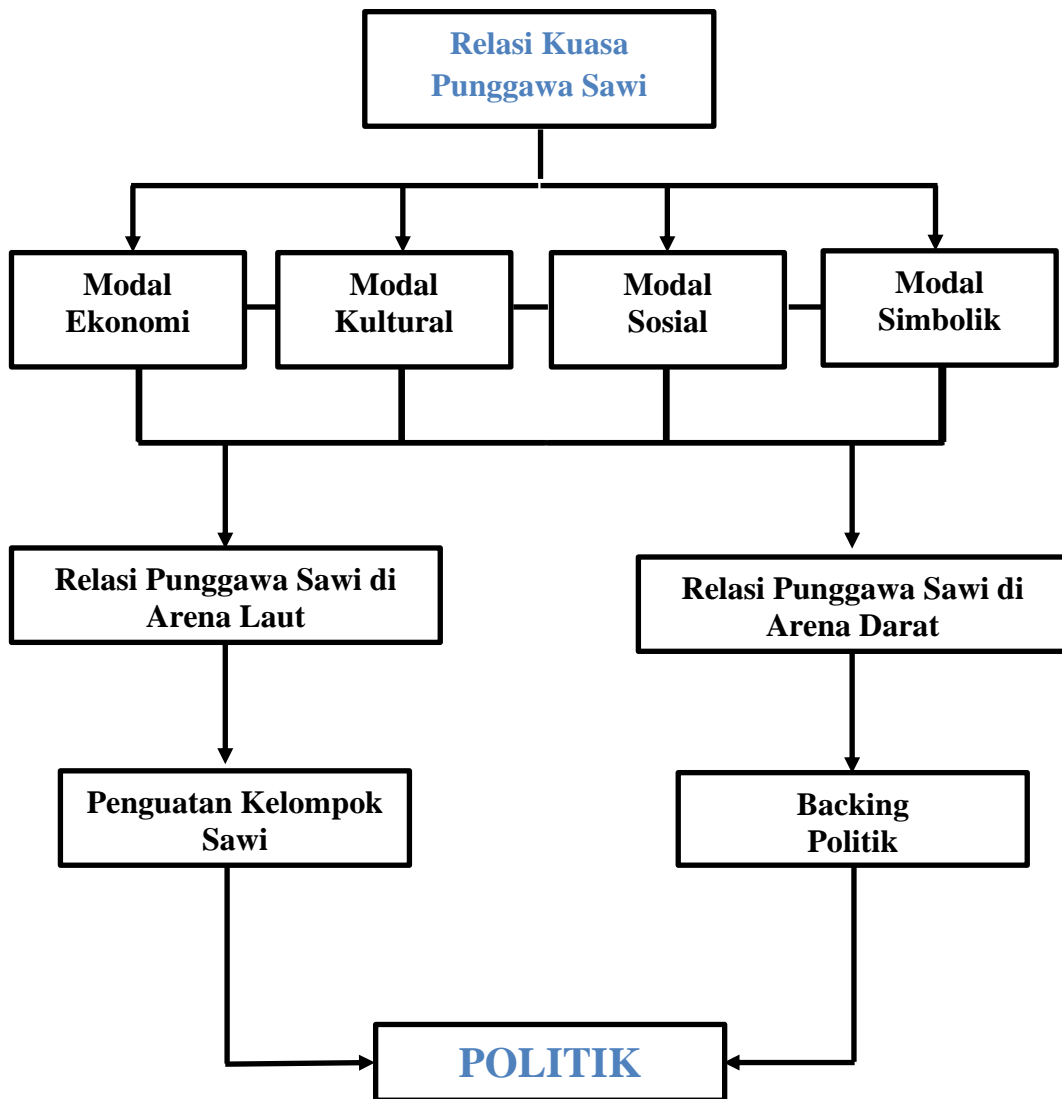
Menurut Bourdieu *modal sosial* ini sejatinya merupakan hubungan sosial bernilai antar orang. Hal tersebut bisa dicontohkan sebagian masyarakat yang berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial masyarakat. *Modal simbolik* adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, satus tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.

Relasi politik punggawa sawi di laut yang dipicuoleh pemberian intensif berupa uang secara cuma-cuma kepada para sawi. Mereka saling membangun relasi yang saling menguatkan. Jadi yang terjadi relasi seimbang sebab hubungan mereka saling menguntungkan.

Sedangkan di darat relasi kuasa tidak hanya terbentuk pada persoalan pemberian intensif saja tapi lebih pada persoalan pemberian kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan jaminan kesehatan,

jaminan pendidikan, jaminan sandang dan pangan terhadap keluarga sawi yang di lakukan terus menerus sehingga para sawi suatu saat punggawa membutuhkan bantuan para sawi akan membantu punggawanya terlebih lagi pada kepentingan politik punggawanya.

Relasi kekuasaan yang terjadi antara punggawa sawi pada arena politik dalam perencanaan penelitian ini membahas tentang bagaimana perbedaan antara kepentingan politik yang terjadi antara punggawa sawi yang terjadi di darat dan di laut yang dalam struktur kerja tentu berbeda begitupun kepentingan politiknya seperti punggawa yang ada di laut lebih pada persoalan bagaimana relasi itu terjadi antara punggawa dan sawinya supaya para sawi membuktikan kesetiaannya kepada punggawa, pada punggawa darat lebih pada para sawi akan patuh terhadap punggawanya pada pilihan-pilihan politik praktisnya (Backing politik) seperti pada momentum pemilihan kala kecil seperti pemeliharaan kepala desa sampai pada momentum skala nasional.



Skema 1: Kerangka Pemikiran